



Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Analysis of Collaborative Governance in Waste Management in Sungailiat District, Bangka Regency

Andi Ariansyah, Darol Arkum* & Sena Putra Prabujaya

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Institut Pahlawan 12, Indonesia

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, menunjukkan kompleksitas yang tinggi seiring meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Pola pengelolaan yang masih didominasi pendekatan kumpul-angkut-buang menegaskan perlunya perubahan paradigma menuju tata kelola yang lebih kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) yang mencakup konteks sistem, dinamika kolaboratif, kapasitas kolaboratif, serta tindakan dan hasil bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor telah muncul, namun masih bersifat parsial, ad hoc, dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. Rendahnya kepercayaan, komitmen bersama, serta keterbatasan kapasitas aktor non-pemerintah menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi jangka panjang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Pengelolaan Sampah; Sungailiat

Abstract

The problem of waste management in Sungailiat District, Bangka Regency, shows high complexity along with the increase in waste generation, limited infrastructure, and the lack of optimal institutional capacity and community participation. The management pattern, which is still dominated by a collect-transport-throw approach, emphasizes the need for a paradigm shift towards more collaborative governance. This study aims to analyze collaborative governance practices in waste management in Sungailiat District using a qualitative approach and case study design. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies, then analyzed using the Collaborative Governance Regime (CGR) framework which includes the context of the system, collaborative dynamics, collaborative capacity, and shared actions and results. The results of the study show that collaboration between actors has emerged, but it is still partial, ad hoc, and has not been strongly institutionalized. Low trust, mutual commitment, and limited capacity of non-governmental actors are the main inhibiting factors. This study concludes that strengthening collaborative governance that is more structured, inclusive, and long-term oriented is needed to realize sustainable waste management at the sub-district level.

Keywords: *Collaborative Governance*; Waste Management; Sungailiat

How to Cite: Ariansyah, A., Arkum, D., & Prabujaya, S.P. (2026). Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 5 (1):34-42



PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan mendesak di berbagai wilayah, baik di tingkat global maupun lokal (Ahmadi, 2023; Auliani, 2020; Mahyudin, 2014). Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta keterbatasan kapasitas pengelolaan telah menyebabkan timbulan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun (Mukhlis, 2024; Pekanbaru.go.id, 2021; Wirasasmita et al., 2020). Sampah yang tidak dikelola secara efektif tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga memicu persoalan kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas estetika wilayah, serta mengancam keberlanjutan ekosistem (Adi, 2023; Harahap, 2020; Wati et al., 2021).

Di Indonesia, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah belum tertangani secara optimal, sementara sistem pengelolaan yang ada masih didominasi pendekatan kumpul-angkut-buang (Beritahita, 2019; Wachid & Caesar, 2021; Winahyu et al., 2019). Pendekatan tersebut terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan sampah yang bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan sektoral menuju pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat.

Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang cukup serius. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan permukiman yang relatif padat, Sungailiat menghasilkan timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan volume sampah tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai, kapasitas kelembagaan yang kuat, serta partisipasi masyarakat yang optimal. Akibatnya, masih ditemukan praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai, kerusakan fasilitas TPS, serta penanganan sampah yang belum berkelanjutan.

Pengelolaan sampah di Sungailiat tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu aktor, seperti Dinas Lingkungan Hidup, tanpa dukungan dan keterlibatan pihak lain. Kompleksitas persoalan sampah menuntut adanya kerja sama lintas sektor dan lintas aktor yang terkoordinasi dengan baik. Dalam konteks inilah pendekatan *Collaborative Governance* menjadi relevan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat dapat membangun kerja sama, berbagi peran, serta mengambil keputusan bersama dalam pengelolaan sampah (Ansell & Gash, 2018; Melo Conti et al., n.d.; Warsono, 2020).

Collaborative Governance menekankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu proses kolaboratif yang berbasis dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama (Hartati, 2023; Wisnumurti & Larantika, 2021). Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengemukakan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dipengaruhi oleh konteks sistem, dinamika kolaboratif, kapasitas kolaboratif, serta tindakan bersama yang dihasilkan. Kerangka ini memberikan alat analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kolaborasi antaraktor berjalan efektif dalam praktik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di berbagai konteks. Ilyas (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Model of Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang (Studi Kasus di TPA Talangagung, Kecamatan Kepanjen)*" menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola TPA, dan komunitas lokal mampu menciptakan inovasi pengelolaan sampah, seperti pemanfaatan gas metana dan pengurangan pencemaran lingkungan. Namun, penelitian ini juga

menemukan bahwa implementasi kolaborasi belum sepenuhnya optimal akibat rendahnya komitmen sebagian aktor dan keterbatasan partisipasi masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh Daka & Madimutsa (2020) dengan judul "*Collaborative Governance and Community Participation in Solid Waste Management in Lusaka*". Studi ini mengkaji kolaborasi antara pemerintah kota, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik di Kota Lusaka, Zambia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur kolaborasi telah terbentuk, pengelolaan sampah belum berjalan efektif karena partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan mekanisme akuntabilitas terhadap pihak swasta lemah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan kerangka kolaboratif saja tidak cukup tanpa keterlibatan masyarakat yang substansial dan pengawasan yang kuat.

Selain itu, Suzuki & Asari (2020) melalui penelitian berjudul "*A Study on the Operation Improvement of Environmental Learning Facilities and Equipment of the Municipal Solid Waste Disposal Facilities in Japan*" menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan transparansi informasi dalam pengelolaan fasilitas pengolahan sampah. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi fasilitas pembelajaran lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah kota mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam praktik daur ulang. Namun, studi ini juga mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan kelembagaan dan keberlanjutan program edukasi, sehingga kolaborasi antaraktor perlu terus diperkuat.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut dilakukan dalam konteks wilayah dan karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan Kecamatan Sungailiat.

Dalam konteks Sungailiat, pengelolaan sampah dihadapkan pada tantangan khas berupa keterbatasan infrastruktur, meningkatnya timbulan sampah, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana *collaborative governance* dijalankan dalam pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, dengan memperhatikan konteks lokal, dinamika aktor, dan kapasitas kolaboratif yang ada. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan strategi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Pendekatan kualitatif dipilih karena pengelolaan sampah merupakan persoalan publik yang kompleks, melibatkan interaksi multiaktor, kepentingan yang beragam, serta dinamika sosial dan kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Nurahma & Hendriani, 2021; Rahardjo, 2017). Studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara kontekstual bagaimana proses kolaborasi berlangsung, aktor-aktor yang terlibat, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat kecamatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci yang mewakili unsur pemerintah daerah, perangkat kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, sektor

swasta, komunitas pengelola sampah, serta masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pengelolaan sampah, interaksi antaraktor, serta praktik kolaborasi di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup penelaahan kebijakan, peraturan daerah, program pengelolaan sampah, laporan instansi terkait, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh, yang meliputi konteks sistem, dinamika kolaboratif, kapasitas kolaboratif, serta tindakan dan hasil bersama. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sistem, Dinamika, dan Kapasitas Kolaboratif Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungailiat

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, berlangsung dalam konteks sistem yang sarat dengan tekanan lingkungan, keterbatasan kelembagaan, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas lingkungan hidup. Sungailiat sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Bangka memiliki kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi tersebut secara langsung berimplikasi pada tingginya timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga dari aktivitas perdagangan, jasa, dan perkantoran. Dalam situasi ini, sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis kebersihan semata, melainkan sebagai persoalan tata kelola publik yang kompleks dan multidimensi.

Secara empiris, peningkatan timbulan sampah di Sungailiat tidak diimbangi oleh perkembangan sistem pengelolaan yang memadai dan berkelanjutan. Sistem yang berjalan masih sangat bergantung pada pendekatan konvensional kumpul-angkut-buang, di mana sampah dikumpulkan dari lingkungan permukiman, diangkut dengan armada terbatas, dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pendekatan ini cenderung menempatkan TPA sebagai solusi utama, tanpa diikuti oleh strategi pengurangan sampah di sumber, pemilahan yang konsisten, maupun pengolahan lanjutan berbasis daur ulang dan pemanfaatan kembali. Akibatnya, TPA menanggung beban berlebih dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.

Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat semakin mempertegas lemahnya sistem yang ada. Keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum tersebar secara merata dan proporsional sesuai kebutuhan wilayah. Sebagian TPS berada dalam kondisi rusak, kelebihan kapasitas, atau tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Penempatan TPS yang kurang strategis juga menyulitkan akses masyarakat, sehingga mendorong praktik pembuangan sampah di luar TPS, seperti di pinggir jalan, lahan kosong, dan area publik lainnya. Fenomena ini memperburuk kondisi lingkungan dan menimbulkan keluhan masyarakat terkait bau, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas estetika kawasan.

Dari perspektif lingkungan, pengelolaan TPA yang masih bersifat terbuka memperbesar risiko pencemaran tanah dan air akibat air lindi, serta pencemaran udara akibat bau dan gas hasil pembusukan sampah. Dampak lingkungan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar TPA, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan wilayah yang lebih luas. Dengan

demikian, persoalan sampah di Sungailiat tidak dapat dilepaskan dari isu keberlanjutan lingkungan dan kesehatan publik, yang menuntut pendekatan pengelolaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Sungailiat telah didukung oleh kerangka regulasi nasional dan kebijakan daerah yang relatif jelas. Pemerintah daerah memiliki mandat untuk menyusun kebijakan, menyediakan sarana prasarana, melakukan pembinaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik implementasi di tingkat kecamatan. Kebijakan sering kali berhenti pada tataran dokumen, sementara pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah di Sungailiat tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh lemahnya kapasitas sistem untuk menerjemahkan regulasi ke dalam tindakan nyata yang konsisten. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah menjadi arena di mana berbagai kepentingan, keterbatasan, dan ekspektasi publik saling beririsan, sehingga membutuhkan mekanisme tata kelola yang mampu menjembatani perbedaan tersebut.

Dalam konteks aktor, pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan kepentingan yang beragam. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap operasional pengelolaan sampah. Perangkat kecamatan dan kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan daerah dan praktik di tingkat komunitas. Di sisi lain, komunitas lokal, kelompok masyarakat, dan sektor swasta memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui partisipasi langsung, inovasi lokal, dan dukungan sumber daya. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan aktor non-pemerintah masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kolaboratif yang jelas dan berkelanjutan.

Ketergantungan yang tinggi pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih bersifat hierarkis dan sektoral. Pemerintah menjadi aktor dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan, sementara aktor lain cenderung bersikap pasif atau menunggu inisiatif. Pola ini menyebabkan beban pengelolaan sampah terkonsentrasi pada satu aktor, sehingga ketika kapasitas pemerintah terbatas, sistem menjadi tidak responsif dan rentan terhadap krisis lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan sampah sulit mencapai keberlanjutan tanpa adanya kerja sama lintas aktor yang lebih setara.

Aspek sosial dan perilaku masyarakat turut memperkuat kompleksitas konteks sistem pengelolaan sampah di Sungailiat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum terbiasa melakukan pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, atau pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga. Selain itu, masih kuatnya persepsi bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah menyebabkan partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal. Meskipun terdapat inisiatif komunitas seperti bank sampah dan kegiatan gotong royong, inisiatif tersebut belum berjalan secara konsisten karena minimnya dukungan kelembagaan dan insentif.

Dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR), kondisi sistem yang penuh tekanan ini sekaligus berperan sebagai pendorong (*drivers of collaboration*). Timbulan sampah yang terus meningkat, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta meningkatnya keluhan masyarakat menciptakan kesadaran bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu

aktor saja. Dorongan regulatif, tekanan sosial, dan kebutuhan praktis di lapangan menjadi pemicu awal munculnya interaksi antaraktor, meskipun interaksi tersebut belum berkembang menjadi kolaborasi yang terinstitusionalisasi.

Dinamika kolaboratif yang terbentuk di Kecamatan Sungailiat masih berada pada tahap awal dan cenderung bersifat ad hoc. Interaksi antaraktor terjadi terutama dalam konteks operasional dan penanganan masalah jangka pendek, seperti penumpukan sampah atau kondisi darurat lingkungan. Mekanisme dialog yang inklusif dan berkelanjutan, yang memungkinkan aktor-aktor untuk berbagi perspektif, membangun kesepahaman, dan merumuskan tujuan bersama, belum terbangun secara kuat. Akibatnya, kolaborasi belum mampu menghasilkan kesepakatan strategis yang berjangka panjang.

Kepercayaan (trust) antaraktor menjadi isu sentral dalam dinamika kolaboratif ini. Pemerintah daerah cenderung menilai partisipasi masyarakat dan sektor non-pemerintah masih rendah dan tidak konsisten, sementara masyarakat memandang pemerintah belum optimal dalam menyediakan layanan dan fasilitas pengelolaan sampah. Ketimpangan persepsi ini menghambat terbentuknya komitmen bersama (shared commitment), yang merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan collaborative governance. Tanpa kepercayaan dan komitmen bersama, interaksi antaraktor sulit berkembang menjadi kerja sama yang berkelanjutan dan produktif.

Dari sisi kapasitas kolaboratif, kemampuan aktor non-pemerintah untuk terlibat secara aktif masih terbatas. Komunitas lokal memiliki potensi besar sebagai agen perubahan perilaku masyarakat, tetapi keterbatasan kapasitas teknis, organisasi, dan akses terhadap sumber daya membatasi kontribusi mereka. Sektor swasta juga belum terlibat sebagai mitra strategis jangka panjang, melainkan lebih sering hadir dalam bentuk dukungan insidental. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas kolaboratif di Sungailiat belum sepenuhnya berkembang untuk mendukung tata kelola pengelolaan sampah yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Tindakan Bersama, Hasil Kolaborasi, dan Implikasi Tata Kelola Pengelolaan Sampah

Tindakan bersama (collaborative actions) dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat merupakan wujud konkret dari dinamika dan kapasitas kolaboratif yang telah terbentuk, meskipun masih berada pada tahap awal. Dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR), tindakan bersama mencerminkan sejauh mana interaksi antaraktor mampu menghasilkan keputusan, program, atau aktivitas kolektif yang diarahkan pada penyelesaian masalah publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan bersama di Sungailiat telah muncul dalam beberapa bentuk, namun belum terintegrasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Bentuk tindakan bersama yang paling menonjol terlihat pada upaya koordinatif antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dengan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan pengangkutan dan penanganan sampah. Koordinasi ini terutama berfokus pada aspek operasional, seperti penjadwalan pengangkutan, penataan TPS, serta penanganan kondisi darurat ketika terjadi penumpukan sampah. Meskipun melibatkan lebih dari satu aktor, tindakan bersama ini masih bersifat reaktif dan berorientasi pada penanganan masalah jangka pendek, bukan pada transformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Selain itu, terdapat beberapa inisiatif yang melibatkan komunitas lokal dan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti kerja bakti lingkungan, pengelolaan bank sampah, dan edukasi pemilahan sampah. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan adanya potensi tindakan bersama berbasis partisipasi masyarakat. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut masih berjalan secara sporadis dan sangat bergantung pada semangat individu atau kelompok tertentu. Ketiadaan dukungan kelembagaan yang konsisten menyebabkan keberlanjutan tindakan bersama ini belum terjamin.

Keterlibatan sektor swasta dalam tindakan bersama pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat masih relatif terbatas. Peran sektor swasta umumnya muncul dalam bentuk dukungan insidental, seperti bantuan sarana atau kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, keterlibatan tersebut belum diarahkan pada kemitraan strategis jangka panjang yang terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan sampah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan bersama lintas sektor belum sepenuhnya berkembang sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif yang mapan.

Dari sisi hasil kolaborasi (*collaborative outcomes*), penelitian menemukan bahwa dampak dari tindakan bersama yang telah dilakukan masih bersifat terbatas. Beberapa hasil positif dapat diidentifikasi, seperti meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan adanya perbaikan sementara pada kondisi TPS tertentu. Namun, hasil tersebut belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Timbulan sampah tetap tinggi, praktik pembuangan tidak terpilah masih umum terjadi, dan ketergantungan pada TPA sebagai solusi akhir masih dominan.

Keterbatasan hasil kolaborasi ini tidak terlepas dari lemahnya integrasi antara tindakan bersama dengan perencanaan strategis pengelolaan sampah. Tindakan kolaboratif yang dilakukan belum didukung oleh indikator kinerja bersama, mekanisme evaluasi kolektif, maupun pembagian peran yang jelas antaraktor. Akibatnya, keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan bersama sulit diukur secara objektif dan tidak menjadi dasar pembelajaran bersama bagi penguatan kolaborasi ke depan.

Dalam perspektif CGR, kondisi ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi di Kecamatan Sungailiat belum sepenuhnya mencapai tahap *joint action* yang menghasilkan nilai publik yang berkelanjutan. Kolaborasi masih terfragmentasi, dengan hasil yang bersifat parsial dan belum terakumulasi menjadi perubahan sistemik. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif memerlukan lebih dari sekadar keterlibatan aktor; diperlukan pula institusionalisasi kolaborasi dalam bentuk forum bersama, aturan main yang disepakati, serta mekanisme akuntabilitas kolektif.

Implikasi dari temuan ini terhadap tata kelola pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat cukup signifikan. Pertama, pengelolaan sampah tidak dapat lagi diposisikan sebagai urusan teknis semata, melainkan sebagai persoalan tata kelola publik yang menuntut kolaborasi lintas aktor. Dominasi satu aktor tanpa dukungan kolaboratif terbukti tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan sampah. Kedua, tindakan bersama yang bersifat *ad hoc* perlu ditransformasikan menjadi kolaborasi yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis tujuan bersama.

Dari sisi teoretis, temuan penelitian ini memperkaya kajian *collaborative governance* dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor dan interaksi awal, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan tindakan bersama yang terintegrasi dan berdampak. Studi ini menegaskan bahwa pada level kecamatan, tantangan *collaborative governance* sering kali terletak pada lemahnya kapasitas institusional dan belum terbentuknya mekanisme kolaborasi yang stabil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap penerapan kerangka CGR dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Diperlukan penguatan kelembagaan kolaborasi melalui pembentukan forum multiaktor yang melibatkan pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan masyarakat secara setara. Selain itu, perlu disusun strategi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi yang dilengkapi dengan pembagian peran yang jelas, indikator kinerja bersama, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kolektif. Penguatan kapasitas aktor non-pemerintah melalui

pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas tindakan bersama.

Dengan demikian, tindakan bersama dan hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Tantangan yang dihadapi menegaskan perlunya penguatan tata kelola kolaboratif yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Analisis ini menempatkan collaborative governance bukan sekadar sebagai konsep normatif, tetapi sebagai kerangka praktis yang membutuhkan komitmen, kapasitas, dan institusionalisasi agar mampu menghasilkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bernilai publik.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat berlangsung dalam konteks sistem yang berada di bawah tekanan lingkungan dan sosial yang tinggi, ditandai oleh meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasinya belum berjalan efektif akibat dominasi pendekatan hierarkis, ketergantungan pada pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Dinamika kolaboratif yang terbentuk masih bersifat awal dan ad hoc, dengan tingkat kepercayaan dan komitmen bersama yang belum kuat, sehingga kapasitas kolaboratif lintas aktor—baik komunitas maupun sektor swasta—belum berkembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa konteks sistem yang kompleks di Sungailiat memang mendorong kebutuhan akan kolaborasi, namun belum diimbangi dengan kesiapan kelembagaan dan sosial yang memadai untuk menopang praktik collaborative governance yang berkelanjutan.

Tindakan bersama dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sungailiat telah muncul dalam bentuk koordinasi operasional antarinstansi pemerintah serta keterlibatan terbatas komunitas dan sektor swasta, namun masih bersifat parsial, reaktif, dan belum terintegrasi secara strategis. Hasil kolaborasi yang dihasilkan sejauh ini memberikan dampak positif yang terbatas, seperti peningkatan kesadaran lingkungan pada sebagian masyarakat, tetapi belum mampu mendorong perubahan sistemik dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan. Lemahnya institusionalisasi kolaborasi, ketiadaan indikator kinerja bersama, serta belum jelasnya pembagian peran dan mekanisme akuntabilitas kolektif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas tindakan bersama. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan collaborative governance di tingkat kecamatan memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif yang lebih terstruktur, inklusif, dan berorientasi jangka panjang agar mampu menghasilkan nilai publik dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Adi, M. W. P. (2023). *Polemik Sampah di Kota Batu*. Times Indonesia.
- Ahmadi. (2023). *Atasi Sampah, Pekanbaru Gandeng Investor Jerman dan Singapura: Nilainya Rp1 Triliun*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidias*, 1(5), 330–338. <https://doi.org/10.31004/ABDIDAS.V1I5.80>
- Beritahita, R. (2019). Walikota Bogor Larang Kantong Plastik, Sampah Berkurang 58 Ton. *Betahita.Id*.
- Daka, M., & Madimutsa, C. (2020). Collaborative Governance and Community Participation in Solid Waste Management in Lusaka. *African Journal of Governance and Development*, 9(2), 524–542. <https://ajgd.journalofgovernance.com/index.php/ajgd/article/view/173>

Andi Ariansyah, Darol Arkum & Sena Putra Prabujaya, Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Harahap, R. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan Dan Karakteristik Sampah Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan*. https://www.academia.edu/100044751/Optimalisasi_Pengelolaan_Sampah_Berdasarkan_Timbulan_Dan_Karakteristik_Sampah_DI_Kelurahan_Gedung_Johor_Kecamatan_Medan_Johor_Kota_Medan
- Hartati, D. (2023). Model Collaborative Governance. *Literature Review*, 11–27.
- Ilyas, M. A. F. (2020). *Model Of Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Tpa Talangagung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang)*.
- Mahyudin, R. P. (2014). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN. *EnviroScienteeae*, 10, 75–79.
- Melo Conti, D., Hoyos Guevara, A. J., Heinrichs, H., Silva, L. F., Quaresma, C. C., & Souza Beté, T. (n.d.). Collaborative governance towards cities sustainability transition. *Urbe*, 11, 1–19. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20190046>
- Mukhlis, M. (2024). Optimalisasi Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengatasi Penanggulangan Darurat Sampah Tpa Regional Payakumbuh. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 11964–11976. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i4.36121>
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>
- Pekanbaru.go.id. (2021). *Pekanbaru Punya 257 Bank Sampah*.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*.
- Suzuki, E., & Asari, M. (2020, November). A Study on the Operation Improvement of Environmental Learning Facilities and Equipment of the Municipal Solid Waste (MSW) Disposal Facilities in JAPAN. *Proceedings of the Annual Conference of Japan Society of Material Cycles and Waste Management*. https://doi.org/10.14912/JSMCWM.31.0_57
- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Warsono, H. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *Perspektif*, 10(1), 195–203. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaukat, Y. (2019). Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1–17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626
- Wirasmita, R. H., Arianti, B. D. D., Uska, M. Z., Kholisho, Y. N., Wardi, Z., Gunadi, R. A. A., Parlindungan, D. P., Parta Santi, A. U., Aswir, & Aburahman, A. (2020). Bahaya Sampah Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2714–6286), 1–8. <https://doi.org/10.29408/ab.v1i2.2749>
- Wisnumurti, A. A. G. O., & Larantika, A. A. A. D. (2021). Collaborative Governance: Model Pengembangan Ekowisata di Desa Siangan. In *Postgraduated Community Service Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 10–15). <https://doi.org/10.22225/pcsj.2.1.2021.10-15>